

Dukungan Arab Saudi Terhadap Kudeta Mesir Tahun 2013

Kaza* & M. Saeri*

Abstract

This research describes Saudi Arabia's support against Egypt military coup upon, the first Egyptian Moslem President elected by democracy. This support is convinced by King Abdullah bin Abdul Aziz by various media, Saudi Arabian Government pledges fresh money six day after Morsi's coup. This study applies qualitative research method with library research. The data sources are from books, journals, and the Internet. This study uses security theory and nation-state level of analysis. This Research explain that Saudi Arabia under King Abdullah is the first leader supporting morsi's coup. The Support is emerged by the fact that Muslim Brotherhood dominated in Egyptian political, it would be ideological treat to Saudi Arabia governance.

Keywords: *Coup, Mohammad Morsi, Muslim Brotherhood, Ideological treat, Support.*

Pendahuluan

Pada penghujung 2010 hingga 2011, kawasan Timur Tengah mengalami pergolakan politik yang dikenal dengan “*Jasmine Revolution*”. Suatu revolusi yang bertujuan untuk menumbangkan rezim otoriter dan menggantikan dengan sistem demokrasi. Mesir merupakan salah satu negara yang tidak lepas dari revolusi tersebut. Revolusi itu telah berhasil menumbangkan penguasa diktator Husni Mubarak yang berkuasa selama 30 tahun. Lengsernya Husni Mubarak pada tahun 2011 menandakan awal mula berdirinya sistem demokrasi di Mesir. Melalui pemilihan umum (pemilu) maka terpilihlah Mursi sebagai presiden Mesir yang dipilih secara demokratis.

Diawal pemerintahan Mursi stabilitas politik Mesir masih tetap bergejolak. Hal ini ditandai demonstrasi yang setiap hari terjadi, bentrok antara pendukung dan penentang pemerintah, protes-protes terhadap dekrit presiden, dan pelaksanaan referendum¹. Pada 22 November 2012, Mursi menerbitkan dekrit tentang kekuasaan baru buat dirinya sendiri. Namun, dia membatalkan dekrit itu pada 8 Desember setelah ada penolakan luas. Lebih

* Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional Angkatan 2010

* Ketua Laboratorium Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Riau

¹ Trias Kuncahyono, *Tahrir Square Jantung Revolusi Mesir*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2013, hlm.

dari 64% pemilih dalam referendum dua putaran mendukung konstitusi baru itu dalam sebuah pemungutan suara yang oposisi katakan telah dicurangi. Mahkamah Agung Mesir tidak mengesahkan Senat yang didominasi kaum Islamis, yang mengemban sebuah peran legislatif ketika parlemen dibubarkan, dan sebuah panel yang menyusun konstitusi². Hasil ini memicu pro dan kontra antara oposisi dan pendukung Mursi.

Gelombang krisis politik di Mesir kembali mencapai puncaknya pada tanggal 3 Juli 2013 militer Mesir yang di pimpin oleh panglima Angkatan Bersenjata, Abdel Fattah al-Sisi, meng kudeta tampuk kepresiden Mursi. Kudeta atas Presiden Mursi lebih didasarkan pada dua kubu. Kubu pertama, adalah kelompok Ikhwanul Muslim yang merupakan pendukung dalam memotori kemenangan Presiden Mursi dalam pemilu demokratis pertama di Mesir. Sedangkan kubu kedua anti Mursi yang menuntut agar Presiden Mursi mundur dari jabatannya, Karena Mursi dinilai tidak mampu melakukan transformasi institusi otoritarian dan mereformasi sistem ekonomi menjadi sistem yang adil, jujur dan pantas. Mursi juga dianggap tidak mampu menjalin kesepakatan dengan militer dan enggan menanggapi suara keberatan pihak oposisi terhadap rancangan konstitusi baru.

Kudeta militer Mesir atas Presiden Mursi menimbulkan berbagai respon yang serius dari negara-negara Timur Tengah. Salah satu negara Timur Tengah yang memberikan respon atas kudeta Mesir adalah Arab Saudi. Arab Saudi memberikan respon dengan mendukung kudeta di Mesir. Dukungan ini disampaikan oleh Raja Abdullah melalui berbagai pemberitaan baik nasional maupun internasional.

Sikap Arab Saudi ini telah menimbulkan keperhatian yang mendalam bagi pemerintahan Mursi. Pada hal, Arab Saudi merupakan negara yang pertama yang dikunjungi oleh presiden Mursi sesudah dilantik menjadi presiden Mesir. Arab Saudi melihat kelompok Ikhwanul Muslim yang membawa Mursi pada puncak kekuasaan di Mesir lebih sebagai ancaman dibandingkan teman. Rasa takut itu semakin menjadi-jadi setelah pengulingan atas Presiden Husni Mubarak pada tahun 2011.

Menarik mencermati sikap Arab Saudi terhadap transformasi yang terjadi di Mesir. Ketika terjadi gelombang revolusi pada masa Husni Mubarak para penguasa Arab Saudi terkesan tidak ambil peduli. Namun, ketika rakyat Mesir yang menentang pemerintahan

²Egidius Patnistik, *Kronologi Kejatuhan Muhammad Mursi*, 14 Juli 2013. <<http://internasional.kompas.com/read/2013/07/04/1104085/Kronologi.Kejatuhan.Muhammad.Mursi>> [diakses 2 November 2013]

Mursi agar lengser dari jabatannya, Arab Saudi secara transparan memberi dukungannya kepada Militer Mesir untuk meng kudeta Mursi.

Bentuk dukungan Arab Saudi terhadap kudeta Mesir melalui pernyataan Raja Abdullah bin Abdul Aziz yang mendukung militer Mesir dalam melawan apa yang disebutnya tindakan terorisme³. Raja Abdullah menyebut keamanan Mesir kini tengah diserang oleh kaum pembenci. Dia memperingatkan bagi siapa pun yang mencampuri urusan dalam negeri Mesir sama dengan memicu hasutan. Dia menambahkan Mesir sesungguhnya bisa melewati proses ini menuju kedamaian. Raja Abdullah juga memberi ucapan selamat kepada pemimpin militer Mesir Jenderal Abdul Fattah al-Sissi⁴.

Arab Saudi juga menjanjikan akan memberikan bantuan kepada Mesir sebesar US\$ 5 miliar (3,9 miliar euro) untuk mendukung ekonomi Mesir, enam hari setelah penggulingkan Presiden Morsi. Kemudian Raja Abdullah mendesak masyarakat internasional, untuk melakukan dukungan bagi pemerintah sementara Mesir dalam upaya untuk mencapai stabilitas keamanan Mesir dan diharapkan bagi negara lain untuk tidak mengambil langkah-langkah yang bisa menghambat upaya pemerintah Mesir menstabilkan negaranya.

Dukungan yang diberikan Arab Saudi, diikuti oleh negara-negara Teluk lainnya, termasuk UEA (United Emirat Arab) dan Kuwait. Mereka memberikan dukungan kepada kudeta yang dilakukan oleh rezim militer di bawah Jenderal Abdul Fattah al-Sissi. Raja Abdullah mendorong perubahan di Mesir dengan membiarkan militer melakukan kudeta. Presiden sementara Mesir Adli Mansour menyambut baik dukungan Raja Abdullah bin Abdul Aziz itu dengan menyatakan Mesir tidak akan melupakan dukungan bersejarah dari Raja Saudi⁵.

³World News, *Raja Saudi dukung aksi militer Mesir*, 17 November 2013.

<http://article.worldnews.com/view/2013/08/17/Raja_Saudi_dukung_aksi_militer_Mesir> [diakses 2 November 2013]

⁴Al Jazeera, *International reactions to Morsi's removal*, 4 Juli 2013 <www.aljazeera.com/201373223029610370.html>[diakses 1 Oktober 2013]

⁵ Ervan Hardoko, *Negara-Negara.Arab.Nyatakan Dukungan Untuk Pemerintah Mesir*, 16 Agustus 2013.<<http://internasional.kompas.com/read/2013/08/18/0139409/Negaranegara.Arab.Nyatakan.Dukungan.untuk.Pemerintah.Mesir>> [diakses 8 November 2013]

Hasil dan Pembahasan

Keamanan memiliki definisi yang universal, namun keamanan dapat digambarkan sebagai suatu kebebasan dari suatu ancaman, bahaya, resiko kecemasan dan keraguan. Dalam hubungan internasional, keamanan adalah kemampuan negara dan masyarakat untuk mempertahankan *independent identity* dan *functional integrity*. Sebagaimana Buzan mendefinisikan keamanan internasional adalah istilah umum yang menangkap begitu banyak unsur yang berbeda, pada dasarnya tidak bisa dipisahkan dari ekonomi, politik internasional, pembangunan internasional, studi kesehatan global, atau hukum internasional dan pemerintahan global maka untuk itu keamanan akan merujuk pada negara, ekonomi, masyarakat, individu, lingkungan dan kelompok politik⁶.

Keamanan bisa dikelompokkan ke dalam dua kategori yang terdiri dari keamanan militer dan keamanan non militer. Keamanan militer adalah keamanan yang didominasi oleh aspek militer. Keamanan militer mencakup interaksi antara dua tingkatan kekuatan, yaitu kemampuan *offensive* bersenjata dan kemampuan *defensive* suatu negara dan persepsi mereka mengenai kedua hal tersebut. Sementara keamanan non militer merupakan keamanan yang di dalamnya terdiri dari unsur-unsur non militer seperti politik, ekonomi, ideologi (sosial) dan lingkungan. Keamanan politik mencakup kesinambungan dan stabilitas organisasi suatu negara, sistem pemerintahan dan ideologi yang melegitimasi dua hal yang disebut pertama. Keamanan ekonomi mencakup pada sumber-sumber daya, finansial dan pasar yang diperlukan untuk mempertahankan tingkat kesejahteraan dan kekuatan negara. Keamanan masyarakat (*societal*) mencakup kemampuan untuk mempertahankan dan menghasilkan pola-pola tradisional dalam bidang bahasa, kultur, keagamaan dan identitas nasional. Keamanan lingkungan mencakup pemeliharaan lingkungan lokal sebagai pendukung utama keberlangsungan hidup manusia⁷.

Menurut Barry Buzan keamanan merupakan salah satu pendekatan dalam mengkaji hubungan internasional yang lebih baik mendalam dan berguna dibanding dengan konsep kekuatan dan perdamaian. Konsep keamanan ini dapat dilihat sebagai pengaruh dari

⁶Nicholas D. Anderson, *Re-defining International Security*, The Josef Korbel Journal of Advanced International Studies -Summer, Georgetown University, 2012. Volume 4. Hlm. 35

⁷ Perwita, Anak Agung Banyu dan Yani, Yanyan Mochamad, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2005, hlm. 121

masing-masing posisi ekstrem antara kekuatan dan perdamaian⁸. Analisis keamanan memerlukan suatu cara pandang yang menempatkan negara dan sistem kedalam sebuah hubungan timbal-balik yang saling menguntungkan dimana negara sebagian terbentuk dengan sendirinya dan sebagian lain dibentuk oleh lingkungan anarki yang kompetitif dan sengit. Lingkungan domestik dan dinamika internasional keduanya merupakan hal yang paling penting bagi analisis keamanan karena merupakan hubungan yang kompleks diantara keduanya.

Menurut Muttiah Alagappa, ada empat elemen yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan konsep-konsep keamanan berkaitan dengan pemikiran tradisional dan kontemporer, yaitu :⁹

1. Pihak yang perlu mendapatkan jaminan keamanan.

Pemikiran tradisional mengacu pada pandangan realis, dengan menempatkan negara sebagai objek keamanan. Sedangkan pemikiran kontemporer mengacu kepada pandangan idealis yang menekankan keamanan manusia dalam makna secara luas.

2. Nilai-nilai utama dalam masalah keamanan

Pemikiran tradisional menekankan pada isu-isu kedaulatan negara menyangkut perbatasan wilayah (teritorial) dan perlombaan senjata. Pemikiran kontemporer lebih menekankan isu-isu yang multidimensional seperti dimensi sosial, ekonomi ataupun lingkungan hidup baik langsung ataupun tidak yang dapat mempengaruhi keamanan nasional suatu negara.

3. Bentuk dan sifat ancaman.

Pemikiran tradisional melihat ancaman pada konflik antar negara yang berbentuk perang terbuka, yang sifat ancamannya berdimensi militer. Sedangkan pemikiran kontemporer melihat ancaman bisa berbentuk kekerasan seperti perdagangan narkoba, terorisme dan bisa berbentuk non kekerasan seperti masalah kemiskinan dan degradasi lingkungan.

4. Pendekatan-pendekatan keamanan yang digunakan.

⁸Barry Buzan, *People, State and Fear: An Agenda for International Security Studies in The Post Cold War Era*. Second Edition, Harvester Wheatsheaf, London, 1991, hlm. 2-3

⁹ Rofiq Kurniawan, *Strategi Keamanan Amerika Serikat dalam Merespon Ancaman Senjata Biologi dari Rogue State dan Terrorist Group*, dalam Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Antar Bangsa, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, 2004. Vol. 2.No. 1. 1 Januari 2004, hlm. 284-285.

Pemikiran tradisional lebih menggunakan pendekatan keamanan yang mengarah pada dinamika persenjataan seperti kapabilitas militer secara mandiri, perlombaan senjata, stabilitas pertahanan strategis dan *arm controls* atau *disarmament*. Sedangkan pemikiran kontemporer, mengarah pada *human security* dan kerjasama keamanan baik *common security*, *comprehensive security* dan *cooperative security*.

Ancaman yang paling menakutkan adalah penghancuran unsur-unsur vital negara dan unsur ekosistem serta unsur kehidupan sosial politik. Ancaman non militer merupakan bagian unsur vital negara. Salah satu ancaman non militer yang sangat signifikan adalah ancaman ideologi. Sebagaimana bahwa ideologi dapat menimbulkan ancaman keamanan nasional yang lebih besar dan lebih cepat daripada pergeseran keseimbangan kekuatan militer. Pertama, karena ideologi bisa memicu persepsi ancaman dan mempengaruhi kebijakan negara. Kedua, karena negara terlibat dalam keseimbangan ideasional untuk menanggapi ancaman ideologis.

Dalam sistem internasional yang anarki, tidak mempunyai otoritas manapun yang mampu menjamin ketertiban. Setiap negara harus mencari usaha untuk melindungi diri mereka sendiri. Usaha-usaha yang dilakukan untuk melindungi diri ini membawa mereka kedalam sebuah persaingan hingga setiap negara berusaha dengan seluruh kemampuan mereka untuk memperoleh *power* yang lebih besar yang bertujuan untuk mengantisipasi dampak dari kekuatan negara lain. Ini pada akhirnya membuat negara-negara menjadi tidak aman dan mempersiapkan diri untuk menghadapi keadaan yang paling buruk. Sejak tidak adanya negara yang merasa aman dalam setiap persaingan global, ini menimbulkan kondisi ancaman diantara negara-negara. Negara harus memproteksi segala kondisi yang berpotensi ancaman sebagaimana ancaman ideologi yang disebabkan oleh efek globalisasi yang memiliki dampak bagi identitas nasional negara itu sendiri.

Revolusi Mesir 2011 memberi ruang gerak yang besar bagi kelompok kepentingan di Mesir. Ikhwanul Muslimin merupakan kelompok Islam yang tertua dan paling terorganisir di Timur Tengah bergerak mengambil peran dalam berbagai bidang politik untuk membangun Mesir pasca revolusi. Ikhwanul Muslimin telah mampu merebut kekuasaan di Mesir dengan membentuk sayap politiknya yaitu mendirikan partai Hizb Al-Hurriya Wal'Adalah (*Freedom and Justice*). Lewat FJP kelompok Ikhwanul Muslimin

berhasil mengantarkan Muhammad Mursi sebagai Presiden yang pertama dipilih secara demokratis di Mesir pada puncak kekuasaan. Arab Saudi merasa munculnya kelompok Ikhwanul Muslimin menjadi penguasa di Mesir sebagai ancaman bagi negaranya. Karena gerakan Ikhwanul Muslim akan menambah pengaruh yang kuat dalam membawa perubahan reformasi dengan corak pemerintahan demokrasi yang pada akhirnya akan menghapus rezim-rezim diktator dan kekuasaan Raja-Raja khususnya bagi Raja Abdullah. Kekhawatiran Arab Saudi munculnya Ikhwanul Muslimin di Mesir adalah bukti adanya persaingan ideologis. Arab Saudi mengambil langkah dengan memberi dukungan yang penuh kepada militer Mesir dalam meng kudeta Presiden Muhammad Mursi dari kekuasaannya sebagai upaya untuk menjaga keamanan dari ancaman ideologi yang menjadi tujuan keamanan negaranya.

Keterlibatan Amerika dalam Kudeta Mesir

Amerika Serikat Lewat Presiden Barack Obama baru-baru ini menyatakan Amerika Serikat tidak memihak dalam krisis Mesir yang berujung pada penggulingan presiden terpilih secara demokratis oleh militer Mesir. Namun peneliti di University of California, Berkeley, mengatakan mereka memiliki dokumen yang menceritakan cerita yang berbeda. Review puluhan dokumen pemerintah federal AS menunjukkan Washington secara diam-diam mendanai tokoh oposisi Mesir yang menyerukan penggulingan presiden negara itu, Muhammad Mursi.

Para pemimpin Ikhwanul Muslimin di Mesir telah menyerukan kepada pendukungnya untuk bergabung protes di Kairo sebagai pendukung pro Mursi dengan melakukan demonstrasi di masjid al-Rabaa Adawiya di pinggiran Kairo Nasr City. Sementara itu, orang-orang yang mendukung kudeta militer yang menggulingkan Mursi mengatakan mereka akan mengadakan aksi unjuk rasa di Tahrir Square. Beberapa tokoh anti Mursi sekarang di tengah-tengah laporan kontroversial mengatakan mereka menerima dana dari Amerika Serikat

Laporan itu mengatakan bahwa Washington memberikan uang kepada tokoh senior oposisi di Mesir, banyak dari mereka ingin Muhammad Mursi digulingkan sebagai presiden. Di antara kelompok-kelompok yang dikatakan telah menyalurkan jutaan dolar

untuk aktivis Mesir, adalah *National Endowment for Democracy*, sebuah organisasi semi pemerintah yang berbasis di Washington. Uang dari departemen luar negeri dikatakan telah diberikan kepada anggota oposisi dengan kedok bantuan demokrasi dan di antara mereka yang menerima dana adalah mantan perwira polisi, Kolonel Umar Afifi Suliman, yang dikatakan telah merencanakan serangan kekerasan terhadap para pejabat Mesir pada masa pemerintahan Mursi¹⁰

Dokumen yang diperoleh oleh Program Pelaporan Investigasi di UC Berkeley menunjukkan AS menyalurkan dana melalui program Departemen Luar Negeri untuk mempromosikan demokrasi di kawasan Timur Tengah. Program ini didukung penuh semangat aktivis dan politisi yang telah menimbulkan kerusuhan di Mesir, setelah Presiden otokratik Husni Mubarak digulingkan dalam pemberontakan rakyat pada bulan Februari 2011.

Setelah serangan 11 September, AS mulai melakukan upaya yang lebih radikal dari apa yang disebut promosi demokrasi. Presiden George Bush mendirikan sejumlah organisasi dirancang untuk melibatkan kelompok-kelompok masyarakat sipil dan mempromosikan tata pemerintahan yang baik di Timur Tengah. Ada juga beberapa tekanan diplomatik singkat dari AS untuk mengadakan pemilu yang bebas. Presiden Barack Obama mencoba untuk menarik garis antara dirinya dan pendahulunya. Dalam pidato di Kairo pada tahun 2009 dia mengatakan tidak ada sistem pemerintahan harus dikenakan pada satu bangsa dengan yang lain. Namun Obama juga telah dikritik karena reaksinya terhadap Arab Spring, yang kadang-kadang telah tampak ragu-ragu dan tidak konsisten.

Program Departemen Luar Negeri, dijuluki oleh para pejabat AS sebagai inisiatif bantuan demokrasi, merupakan bagian dari upaya pemerintahan AS yang lebih luas untuk mencoba menghentikan mundurnya sekularis pro Washington, dan untuk memenangkan kembali pengaruh di negara-negara Arab Musim Semi yang melihat munculnya Islamis, yang sebagian besar menentang kepentingan AS di Timur Tengah.

Aktivis pendanaan oleh program ini termasuk pendanaan seorang perwira polisi Mesir untuk merencanakan kekerasan menggulingkan pemerintah Mursi, pendanaan

¹⁰Al Jazeera, *Did US funds help oust Morsi? discuss claims that Washington has quietly bankrolled Egyptian groups that pressed for the president's removal*, 13 Juli 2013<<http://www.aljazeera.com/programmes/insidestory/2013/07/201371392855688681.html>>[diakses 18 Maret 2014]

seorang politisi anti Islam yang menganjurkan menutup masjid dan menyeret pengkhotbah keluar secara paksa, Dia mendesak para aktivis untuk mengepung masjid dan menarik dari mimbar semua pengkhotbah Muslim dan tokoh agama yang mendukung konstitusi yang diusulkan negara, tindakan mengepung masjid telah tewas beberapa orang, serta termasuk pendanaan politisi oposisi yang mendorong penggulingan pemimpin negara pertama yang terpilih secara demokratis.

Informasi yang diperoleh di bawah *Freedom of Information Act*, wawancara, dan catatan publik mengungkapkan bantuan demokrasi Washington telah melanggar hukum Mesir, yang melarang pendanaan politik asing. Hal ini juga telah merusak peraturan pemerintah AS yang melarang penggunaan uang pembayar pajak untuk mendanai politisi asing, atau keuangan kegiatan subversif yang menargetkan pemerintah yang terpilih secara demokratis¹¹.

Pernyataan Dukungan Raja Abdullah Atas Kudeta Mesir

Sejak penggulingan Mursi dan penunjukan pemerintah sementara di Kairo, Arab Saudi kembali dengan dukungan yang aktif untuk perkembangan politik di Mesir yang mencakup instalasi pemerintah sementara yang baru. Kegembiraan Saudi dapat diukur dari fakta bahwa setelah penggulingan Mursi, Arab Saudi segera mengumumkan paket bantuan US\$ 5 milyar untuk Mesir. Para pemimpin Arab telah memberikan pernyataan yang mendukung perkembangan pasca Mursi di Mesir. Arab Saudi juga menunjukkan sikap tidak ambil peduli terhadap pembunuhan para pendukung Ikhwanul Muslimin oleh pasukan keamanan Mesir.

Dukungan Saudi bagi rezim baru di Kairo secara proporsional terkait dengan ketidaksetujuan atas Ikhwanul Muslimin sebagai buntut dari pemilu 2012, ketika menjadi semakin jelas bahwa Ikhwanul Muslimin telah menjadi penguasa di Mesir dan akan membentuk sistem pemerintahan dengan konsep-konsep IM, Arab Saudi melakukan upaya untuk mengakomodasi Ikhwanul Muslim dalam kebijakan luar negerinya dengan menunjukkan sikap yang tidak begitu dekat dengan IM. Meskipun Ikhwanul Muslim lewat

¹¹ Emad Mekay, Exclusive: *US bankrolled anti-Morsi activists Documents reveal US money trail to Egyptian groups that pressed for president's removal.*, 10 Juli 2013.
<<http://www.aljazeera.com/indepth/features/2013/07/2013710113522489801.html>. [diakses 18 Maret 2014]

Presiden Mursi berupaya untuk menjaga hubungan baik dengan Riyadh. Baik dalam rangka membangun kerjasama maupun menjaga kehangatan hubungan sesama muslim yang dibutuhkan untuk membangun rasa saling percaya. Tetapi Saudi tetap menganggap bahwa Ikhwanul Muslimin merupakan tantangan ideologis otoritas Islam di dunia khususnya Arab Saudi, kemudian rasa tidak percaya Arab Saudi dengan IM ditambah lagi semakin dekatnya hubungan Mursi dengan Turki yang siap mendukung Ikhwanul baik dibidang politik maupun ekonomi. Selain itu, upaya Mursi untuk menjangkau Teheran dalam membangun kerjasama telah membuat penilaian bagi Raja Abdullah bahwa Mursi tidak bisa menjadi teman terpercaya dalam lingkungan politik di kawasan Timur Tengah. Rasa tidak percaya ini telah menimbulkan persepsi tertentu bagi Arab Saudi. Hingga menyebabkan perdamaian antara dua negara menjadi gelisah.

Disaat terjadinya krisis politik terkait protes penentang dan pendukung terhadap pemerintahan Mursi yang pada gilirannya menyebabkan intervensi militer dijadikan momentum bagi Arab Saudi dengan mengambil langkah mendukung aksi militer untuk melakukan kudeta terhadap Presiden Muhammad Mursi dari kekuasaannya.

Harapan Saudi adalah agar Ikhwanul Muslimin tidak menjadi ancaman dan bekerja sebagai sekutu bawahan dalam urusan bilateral dan regional. Selanjutnya, penguasa Arab Saudi tidak membiarkan nilai-nilai ideologis IM dan demokrasi berkembang di lingkungan Arab yang pengaruh itu muncul akibat pergeseran politik ke arah demokrasi dari Ikhwanul Muslimin yang dapat menyebabkan tuntutan serupa apa yang telah terjadi di Mesir bisa terjadi di Arab Saudi. Ketika muncul bahwa demokrasi sebagai sistem politik dan Ikhwanul Muslimin sebagai partai politik yang menetap di Mesir, menjadi penyebab ancaman yang serius terhadap Saudi dan seluruh keluarga kerajaan¹².

Raja Abdullah meminta Arab untuk berdiri bersama untuk melawan upaya apa yang telah mengguncang Mesir. Sebagaimana sebuah pernyataan yang disampaikannya. Raja Saudi Tetap Mendukung Militer Mesir, dan Sebut Ikhwan Sebagai teroris. Dia menyatakan¹³:

¹² Prasanta Kumar Pradhan, Post-Morsi Egypt: *Saudi Manoeuvring and Iranian Dilemma*, Associate Fellow at the Institute for Defence Studies & Analyses (IDSA), New Delhi, 27 September 2013, hal. 3-5

¹³ Al Jjazeera, *Saudi king backs Egypt's military*, 17 Agustus 2013.

<<http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2013/08/201381615196784361.html>>[diakses 23 Januari 2014]

"The Kingdom of Saudi Arabia, its people and government stood and stands by today with its brothers in Egypt against terrorism." "I call on the honest men of Egypt and the Arab and Muslim nations ... to stand as one man and with one heart in the face of attempts to destabilise a country that is at the forefront of Arab and Muslim history,"

Raja Arab Saudi Abdullah bin Abdul Aziz menyatakan dukungannya kepada pemerintah Mesir dalam melawan apa yang disebutnya tindakan terorisme. Abdul Aziz menyebut keamanan Mesir kini tengah diserang oleh kaum pembenci. Dia memperingatkan bagi siapa pun yang mencampuri urusan dalam negeri Mesir sama dengan memicu hasutan. Raja Abdullah menambahkan Mesir sesungguhnya bisa melewati proses ini menuju kedamaian. Situasi di Mesir sangat genting dan Arab Saudi telah menempatkan diri di posisi yang benar.

Seruan Raja Abdullah kepada bangsa Arab untuk mendukung junta militer dan kedaulatan pemerintah interim Mesir di sambut baik oleh negara-negara teluk. Alasan mengapa beberapa negara Teluk telah melancarkan kampanye terhadap anggota Ikhwanul Muslimin adalah karena mereka khawatir kekuasaan IM menjangkau di negara-negara Arab Spring. Menambah kekhawatiran mereka adalah semakin berkembangnya hubungan antara pemerintah Ikhwanul Muslimin di satu sisi dengan negara-negara yang memiliki gerakan-gerakan yang berafiliasi kepadanya, seperti Republik Turki, yang tampaknya telah menemukan dalam organisasi sekutu baru yang dapat membantu Turki memperluas pengaruhnya di kawasan Arab.

Bantuan US\$5 Miliar Untuk Mesir Setelah Penggulingan Presiden Muhammad Mursi

Arab Saudi akan memberikan bantuan kepada Mesir sebesar US \$ 5 miliar (3,9 miliar euro) untuk mendukung ekonomi Mesir, enam hari setelah militer menggulingkan Presiden Muhammad Mursi. Bantuan tersebut, yang diputuskan oleh Raja Abdullah, pada 9 Juli 2013, akan terdiri atas US \$ 2 miliar deposito bebas bunga di bank sentral Mesir, US \$ 1 miliar donasi, dan setara dengan US \$ 2 miliar berupa produk-produk minyak dan gas.

Bantuan \$ 5 milyar yang disalurkan Arab Saudi mencerminkan dukungan kerajaan terhadap situasi dan perubahan terbaru di Kairo¹⁴.

Cadangan devisa Mesir hanya \$14.9 billion pada akhir Juni, menurut bank sentral negara itu, kurang dari setengah jumlah pada awal tahun 2011. Cadangan, diperlukan untuk menghidupkan kembali ekonomi, terutama sektor konstruksi, pariwisata dan investasi, dalam rangka mengurangi tingkat pengangguran dan mengurangi defisit anggaran negara. Bantuan Dana dari Arab Saudi terdiri dari US \$ 2 miliar deposito bank sentral, \$ 2 milyar pada produk-produk energi, dan \$1 miliar dalam bentuk uang tunai, sebagai mana sampaikan oleh Menteri Keuangan Ibrahim Saudi Alassaf¹⁵.

Bukan itu saja, Arab Saudi bahkan Siap Bantu Mesir jika Barat Stop Bantuan Keuangan. Sebagaimana disampaikan Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Saud al-Faisal. Menteri Luar Negeri Arab Saudi itu mengatakan, Arab Saudi dan negara-negara Islam akan membantu Mesir jika negara-negara Barat menghentikan bantuan keuangan untuk Kairo. Bagi negara-negara yang sudah mengumumkan akan memangkas bantuan untuk Mesir, atau mengancam untuk melakukan itu, kami katakan Arab Saudi dan negara-negara Islam sangat kaya dan tidak ragu membantu Mesir. Pernyataan ini disampaikan sekembalinya Pangeran Faisal dari Perancis untuk menggelar pembicaraan dengan Presiden Francois Hollande, yang mengecam keras pertumpahan darah di Mesir. Pangeran Faisal mengkritik, negara-negara Barat yang mengecam tindakan Mesir membubarkan pendukung Ikhwanul Muslimin. Dia mengatakan, Mesir tengah memerangi terorisme. Semua negara yang mengecam Mesir seharusnya memahami bahwa kerusakan yang terjadi tidak hanya akan menimpa Mesir, tetapi juga menimpa mereka yang berkontribusi atau mendukung masalah dan kekacauan yang terjadi di Mesir.

Hubungan Baik Arab Saudi dengan Pemerintah Sementara Mesir

Pemerintah sementara yang baru di Mesir telah memilih untuk menerima Arab Saudi sebagai teman dengan menerima bantuan Saudi bersama dengan penawaran bantuan

¹⁴Wisnu AS, *Arab Saudi Bantu Mesir US\$5 Miliar*, 10 Juli 2013. <[http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/07/10/7/167059/Arab-Saudi-Bantu-Mesir-US\\$5-Miliar](http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/07/10/7/167059/Arab-Saudi-Bantu-Mesir-US$5-Miliar) [diakses 30 Januari 2014].

¹⁵ CBS news, *Saudi Arabia pledges \$5 billion in aid to Egypt*, 9 Juli 2013.

< <http://www.cbsnews.com/news/saudi-arabia-pledges-5-billion-in-aid-to-egypt>>[diakses 30 Januari 2014]

dari negara-negara Teluk lainnya seperti UEA dan Kuwait. Dukungan dan pake bantuan yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada Mesir sangat berarti bagi pemerintah baru Mesir. Presiden Interim Mesir Adly Mansour tidak akan pernah melupakan dukungan yang diberikan Raja Abdullah. Untuk itu kini Mesir akan kembali memperkuat hubungan dengan Arab Saudi.

Di bawah pemerintah sementara Mesir Adly Mansour, Mesir kembali melakukan hubungan dekat. Hubungan dekat ini sudah terlihat ketika Raja Abdullah memberi dukungan penuh terhadap militer Mesir dan pemerintahan Adly Mansour. Presiden interim Mesir Adly Mansour mendapatkan kembali dukungan dari Raja Arab Saudi Abdullah untuk memerangi terorisme dalam kunjungannya ke Arab Saudi pada 8 Oktober 2013. Kunjungan itu adalah perjalanan perdananya ke luar negeri setelah dia menggantikan Muhammad Mursi yang digulingkan militer pada 3 Juli lalu.

Raja Abdullah, pemimpin pertama yang mendukung pelengseran Mursi, kembali memastikan dukungan Arab Saudi untuk upaya Mesir memerangi terorisme dan menghadapi siapa pun yang mencoba mencampuri urusan dalam negeri Mesir. Arab Saudi dan negara-negara Teluk sudah sejak lama melihat Ikhwanul Muslimin sebagai ancaman. Di antara negara-negara Teluk, hanya Qatar yang menyatakan dukungannya terhadap Ikhwanul Muslimin.

Sebagai bentuk dukungan terhadap Pemerintah Mesir, Arab Saudi dan negara-negara Teluk lainnya bahkan menjanjikan bantuan untuk pemerintahan baru Mesir yang didukung militer. Atas dukungan itu, Mansour menilai kunjungan ke kerajaan kaya minyak itu adalah sebuah keharusan, untuk mengungkapkan rasa terima kasih terhadap pemerintahannya. Raja Abdullah adalah kepala negara pertama yang memberi selamat atas penunjukan Mansour sebagai presiden sementara Mesir, hanya beberapa jam setelah pelantikannya Juli lalu¹⁶.

Mengunjungi kerajaan adalah suatu keharusan, bagi Persiden Adly Mansour untuk berterima kasih kepada Raja Abdullah secara personal atas dukungannya untuk Mesir terkait dukungan ekonomi dan politik diberikan Arab Saudi untuk membangun kembali

¹⁶ Ervan Hardoko, *Arab Saudi Kembali Tegaskan Dukungan untuk Mesir*, 8 Oktober 2013. <<http://internasional.kompas.com/read/2013/10/08/1746063/Arab.Saudi.Kembali.Tegaskan.Dukungan.untuk.Mesir.>> [diakses 3 Februari 2014]

ekonomi Mesir yang kacau ketika terjadinya krisis politik di Mesir. Presiden Adly Mansour sangat mengandalkan dukungan dari Arab Saudi.

Selain itu, Tujuan kunjungan itu juga adalah untuk memperdalam hubungan dengan Saudi pada saat Mesir membutuhkan Saudi lebih dari sebelumnya. Menteri luar negeri Arab Saudi, Saud Al Faisal, menyampaikan bahwa negaranya siap untuk mengkompensasi Mesir untuk setiap bantuan yang ditarik sebagai akibat dari transisi politik. Raja Abdullah juga menegaskan sikap pemerintah dan Kerajaan Arab Saudi mendukung saudara-saudara di Mesir melawan terorisme dan hasutan sekaligus mengatakan pemerintah Mesir yang didukung militer adalah pemerintahan yang sah.

Dukungan ekonomi yang diberikan Arab Saudi akan sangat penting bagi keberhasilan pemerintahan transisi Mesir itu, sebagaimana Mesir telah berjuang untuk memulihkan ekonomi dari resesi yang melanda setelah revolusi 2011. Krisis politik di Mesir yang dilimpahkan menjadi bentrokan dan kekerasan dalam beberapa bulan terakhir, membuat sektor pariwisata dan investasi terhenti. Dukungan yang diberikan oleh Arab Saudi dan negara teluk UEA, memiliki dampak terbesar dalam mencongkel keputusan Mesir membuat jauh dari tekanan situasi ekonomi yang memburuk. Untuk itu, dukungan ekonomi Saudi akan terus menjadi penting tidak hanya dalam jangka pendek tetapi juga dalam jangka menengah serta Para pengamat mengatakan Arab Saudi memprioritaskan hubungan dengan pemerintah yang didukung militer di Kairo dari masalah keamanan juga.

Bagi pemerintah Arab Saudi merangkul dan mendukung pemerintah sementara Mesir Adly Mansour, adalah sebuah investasi dalam hubungan dengan rezim baru di Mesir. Arab Saudi merasa aman dari ancaman pengaruh Ikhwanul Muslimin ketika Militer Mesir mampu melengserkan Mursi dan Ikhwanul Muslimin dari kekuasaannya. Dengan ini Arab Saudi bisa bertahan dalam kebijakan luar negeri dan internal negaranya dalam upaya untuk mencegah gejolak politik dan sosial, kerusuhan dan aksi protes terhadap pemerintah, menstabilkan rezim mereka, dan mencoba untuk mempengaruhi unsur-unsur Islam di negara-negara lain sebanyak mungkin. Sehingga Raja Abdullah harus bertindak tegas dan progresif dalam melakukan kebijakan.

Simpulan

Dukungan Arab Saudi terhadap kudeta Presiden Muhammad Mursi di Mesir adalah langkah-langkah preventif Arab Saudi dengan penerapan kebijakan luar negeri guna melindungi negara dari ancaman dan stabilitas keamanan. Penulis membuat kesimpulan atas penelitian ini dalam beberapa poin. Pertama Arab Saudi dan Mesir adalah dua negara yang menjalin hubungan diplomatik dengan penuh dinamika. Dinamika itu dimulai setelah Revolusi Mesir pada tahun 1952. munculnya Gamal Abdel Nasser sebagai Presiden Mesir, hubungan Arab Saudi dan Mesir penuh dengan perselisihan yang cukup besar dan membuat hubungan diplomatik antar Saudi dan Mesir terputus. Pemulihan hubungan selanjutnya dipercepat di bawah Anwar al-Sadat pada tahun 1970, namun hubungan kedua negara kembali tegang setelah penandatanganan Perjanjian Camp David dengan Israel pada tahun 1979, hingga membuat hubungan Mesir dengan seluruh Arab putus. Pada masa Hunsni Mubarak hubungan bilateral Arab Saudi dan Mesir menjadi signifikan di dunia Arab, kedua negara telah menyusun inti dari apa yang disebut negara-negara Arab moderat yang tetap dekat dengan Amerika Serikat selama periode bergolak setelah invasi ke Irak. Hubungan Arab Saudi dan Mesir kembali memburuk pada masa pemerintahan Presiden Mohammad Mursi, dimulai terjadinya gesekan antara kerajaan Arab Saudi dengan kelompok Ikhwanul Muslim yang merupakan sayap memotori kemenangan Mursi dimana Arab Saudi mendukung tindakan militer Mesir untuk meng kudeta Presiden Mursi.

Kedua, dukungan Arab Saudi terhadap kudeta Mesir langsung disampaikan oleh Raja Abdullah yang mendukung militer. Sebagai bentuk dukungan Arab Saudi memberi bantuan sebesar US\$ 5 milyar untuk Mesir setelah enam hari penggulingan terhadap presiden Muhammad Mursi. Bantuan yang diberikan Arab Saudi adalah sebagai bentuk dukungan untuk menopang pemerintah baru Mesir dalam membangun ekonomi. Arab Saudi juga mengajak bangsa Arab untuk bersama memberi dukungan kepada pemerintah sementara Adly Mansour dalam mestabilisasi Mesir.

Ketiga, keputusan Arab Saudi mendukung militer Mesir melakukan kudeta terhadap Presiden Muhammad Mursi adalah langkah yang tepat dipilih Arab Saudi untuk mencegah ancaman dan pengaruh Ikhwanul Muslimin. Munculnya kelompok Ikhwanul Muslimin yang mengantarkan Mursi pada puncak kekuasaan mejandi ancaman ideologi dan membuat hubungan kedua negara mengalami perubahan. Perubahan hubungan bilateral

tersebut berawal dari kekhawatiran Arab Saudi atas Mesir telah menjadi pengaruh kuat dari Ikhwanul Muslimin. Kekhawatiran itu membuktikan adanya persaingan ideologis antar kedua negara.

Keempat, jika dukungan yang diberikan kepada militer Mesir oleh pemerintah Arab Saudi terhadap kudeta Presiden Muhammad Mursi ini di analisa dengan teori keamanan maka dapat disimpulkan bahwa kehadiran Ikhwanul Muslimin menjadi ancaman yang dapat membahayakan keamanan nasional Arab Saudi. Ancaman itu tertuju pada identitas pemerintah Arab Saudi dan integritas fungsional terhadap kekuatan-kekuatan tertentu yang mereka anggap musuh. Hal yang dapat dilakukan oleh Arab Saudi untuk menangkal semua itu adalah dengan membuat sebuah kebijakan nasional yang dalam hal ini difokuskan terhadap Mesir, sebagai upaya untuk meredam potensi gangguan keamanan nasional dalam negeri, sekaligus dengan tidak melupakan kebijakan luar negeri untuk mengurangi ancaman dari luar.

Daftar Pustaka

Jurnal

- Anderson, Nicholas D., 2012. *Re-redefining International Security*, The Josef Korbel Journal of Advanced International Studies-Summer, Georgetown University, Volume 4.
- Kurniawan, Rofiq., 2004. *Strategi Keamanan Amerika Serikat dalam Merespon Ancaman Senjata Biologi dari Rogue State dan Terrorist Group*, dalam Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Antar Bangsa, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, 2004. Vol. 2. No. 1. 1 Januari. 1

Buku

- Anak Agung Banyu, Perwita. dan Yani., 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Buzan, Barry., 1991. *People, State and Fear: An Agenda for International Security Studies in The Post Cold War Era*. Second Edition. London: Harvester Wheatsheaf.
- Kumar Pradhan, Prasanta., 2013. *Post-Morsi Egypt: Saudi Manoeuvring and Iranian Dilemma*. New Delhi: Associate Fellow at the Institute for Defence Studies & Analyses (IDSA).

Kuncahyono, Trias., 2013. *Tahrir Square Jantung Revolusi Mesir*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.

Website

Al Jazeera, 2013. *Did US funds help oust Morsi? discuss claims that Washington has quietly bankrolled Egyptian groups that pressed for the president's removal*, Tersedia di: <http://www.aljazeera.com/programmes/insidestory/2013/07/201371392855688681.html> [diakses 18 Maret 2014]

_____, 2013. *Saudi king backs Egypt's military*, Tersedia di: <http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2013/08/201381615196784361.html> [diakses 23 Januari 2014]

AS, Wisnu, 2013. *Arab-Saudi-Bantu-Mesir-US\$5 Miliar*, Tersedia di: [http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/07/10/7/167059/Arab-Saudi-Bantu-Mesir-US\\$5-Miliar](http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/07/10/7/167059/Arab-Saudi-Bantu-Mesir-US$5-Miliar) [diakses 30 Januari 2014].

CBS news, 2013. *Saudi Arabia pledges \$5 billion in aid to Egypt*, Tersedia di: <http://www.cbsnews.com/news/saudi-arabia-pledges-5-billion-in-aid-to-egypt> [diakses 30 Januari 2014].

Hardoko, Ervan, 2013. *Arab Saudi Kembali Tegaskan Dukungan untuk Mesir*, Tersedia di: <http://internasional.kompas.com/read/2013/10/08/1746063/Arab.Saudi.Kembali.Tegaskan.Dukungan.untuk.Mesir>. [diakses 3 Februari 2014]

Hardoko, Ervan, 2013. *Negara-negara Arab Nyatakan Dukungan Untuk Pemerintah Mesir*, Tersedia di: <http://internasional.kompas.com/read/2013/08/18/0139409/Negaranegara.Arab.Nyatakan.Dukungan.untuk.Pemerintah.Mesir> [diakses 8 November 2013].

Mekay, Emad, Exclusive: 2013, *US bankrolled anti-Morsi activists Documents reveal US money trail to Egyptian groups that pressed for president's removal*, Tersedia di: <http://www.aljazeera.com/indepth/features/2013/07/2013710113522489801.html> [diakses 18 Maret 2014]

Patnistik, Egidius, 2013. *Kronologi Kejatuhan Muhammad Mursi*, Tersedia di: <http://internasional.kompas.com/read/2013/07/04/1104085/Kronologi.Kejatuhan.Muhammad.Mursi> [diakses 2 November 2013]

World News, 2013. *Raja Saudi dukung aksi militer Mesir*, Tersedia di: http://article.worldnews.com/view/2013/08/17/Raja_Saudi_dukung_aksi_militer_Mesir [diakses 2 November 2013].